

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun Administrasi Pengelolaan Keuangan, kondisi seperti ini biasa dikenal dengan sebutan era otonomi daerah.

Dalam era ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, maka Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA). Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



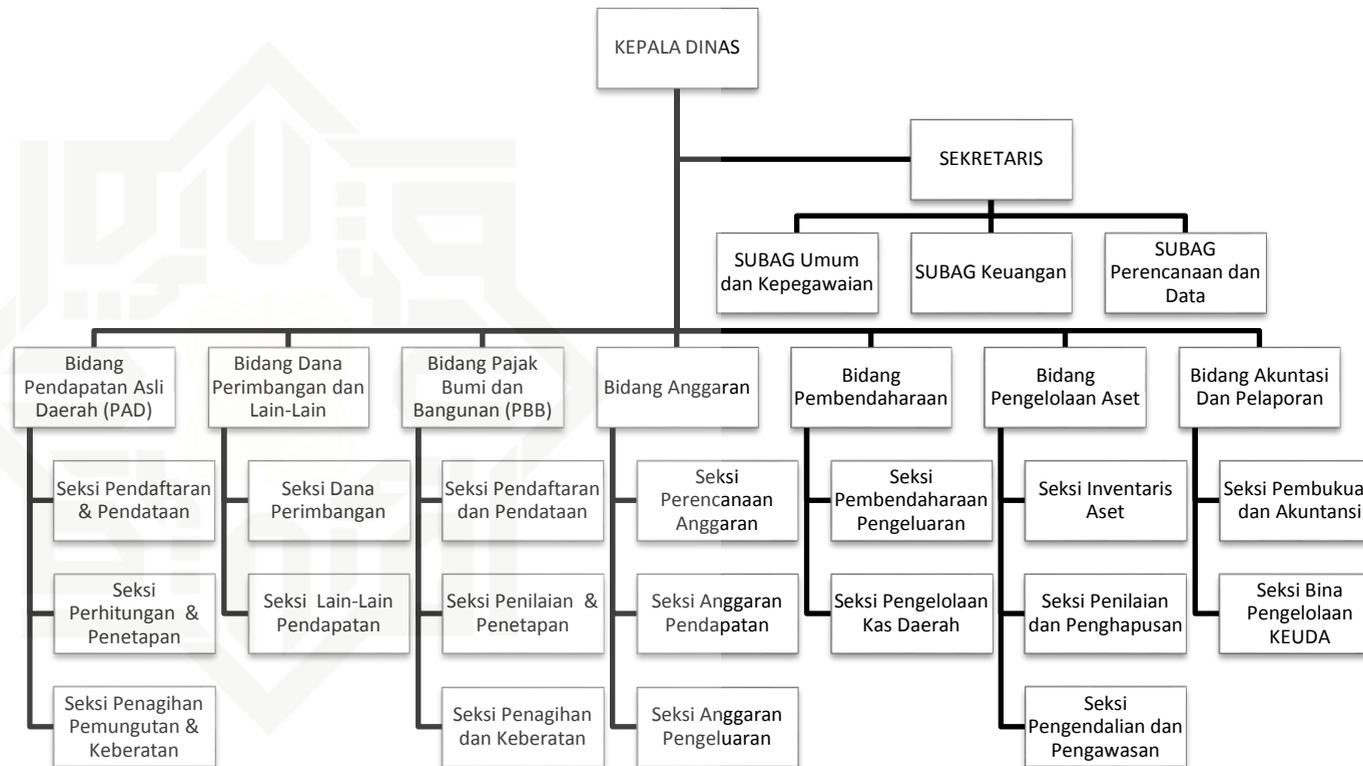
Seiring dengan perubahan nama, maka dengan berpedoman Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Dan Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas di Kabupaten Kampar yang juga merubah beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Sejalan dengan perubahan kewenangan dan penambahan Tugas Pokok dan fungsi serta Visi Misi, Target Dan Sasaran SKSD, maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber khususnya akstensifikasi sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya dan ditambah dengan meningkatnya profesional Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Optimal, Profesional dan Akuntabel semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah sehinga DPPKA harus lebih berbenah dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar



Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, Tahun 2016

2.2 Visi dan Misi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi

Terwujudnya Peningkatan Penerimaan Daerah yang Optimal dan Proporsional serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional Tahun 2017.

Misi

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan tersebut merupakan tantangan bagi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Sebagai penjabaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus diemban, yaitu berupa rumusan/ Pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Yaitu melalui Tiga Misi Sebagai berikut :

- Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas.
- Misi Kedua : Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah.
- Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Ketentuan.

2.3 Uraian Tugas/Bagian Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Adapun masing-masing seksi adalah:

1. Kepala Dinas

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan engelolaan aset.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian wewenang daerah dibidang pendapatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sekretariat

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan menatausahakan kegiatan lainnya.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan program, umum, urusan keuangan dan kepegawaian:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian:

- a) Menyimpan bahan pelayanan, koordinasi, dalam urusan umum, perpustakaan, serta surat-menyurat dan kearsipan.
- b) Menyimpan bahan penyusun perencana dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

2. Sub Bagian Keuangan:

- a. Membantu sekretaris dalam penyusunan Rancangan Anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan di lingkungan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- b. Menyimpan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub bagian perencanaan:
 - a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.
 - b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan satuan kerja.

3. Bidang Pendapatan Asli Daerah

- a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pendapatan asli daerah.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perhitungan pelayanan pendaftaran dan pendapatan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perhitungan penetapan pemungutan dan keberatan.
 - a. Seksi pendapatan dan pendataan:
Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pelayanan pendaftaran pendataan.
 - b. Seksi penghitungan dan penetapan:
Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan dan penagihan.
 - c. Seksi pemungutan dan keberatan:
Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi pemungutan dan keberatan.

4. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset dibidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi dana perimbangan non PBB dan lain-lain pendapatan daerah yang sah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Seksi Dana Pembangunan

Membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja seksi dana perimbangan serta mendistribusikan kepihak-pihak terkait.

2) Seksi Lain-Lain Pendapatan

Membantu kepala bidang untuk menyiapkan bahan perumuan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset dibidang pajak bumi dan bangunan.

b. Menyiapkan perumusan dan koordinasi pajak bumi dan bangunan.

c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi.

1) Seksi pendapatan dan pendataan

a) Melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak bumi bangunan.

b) Memimpin pelaksanaan pendaftaran, pendataan penilaian dan pemetaan objek dan subjek pajak bumi bangunan.

2) Seksi penilaian dan pendapatan

a) Menetapkan besarnya nilai pajak bumi bangunan, menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blanko lain yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan pajak bumi bangunan.

b) Memimpin pelaksanaan penetapan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blanko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang diperlukan dalam pemungutan pendataan pajak bumi bangunan.

3) Seksi Penagihan dan Pelaporan

- a) Melakukan penagihan, penyetoran, penyuluhan, penyisiran, tunggakan, membuat target pendapatan dan membuat laporan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan.
- b) Memimpin pemungutan, penyetoran, penagihan, penyuluhan, penyisiran tugakan, membuat target pendapatan dan membuat laporan relisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan.

6. Bidang Anggaran

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang anggaran.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi perencanaan anggaran.

1) Seksi Perencanaan Anggaran

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perenanaan anggaran.

2) Seksi Anggaran Penerimaan

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran penerimaan.

3) Seksi Anggaran Pengeluaran

Membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi anggaran pengeluaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bidang Pembendaharaan

- a. Melakukan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang pembendaharaan.
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi pembendaharaan.
- c. Menyiapkan perumusan koordinasi verifikasi.
 - 1) Seksi pembendaharaan pengeluaran
Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan kordinasi perbendaharaan serta membantu kepala bidang dalam penatausahaan transaksi penerbitan SP2D kedalam registrasi.
 - 2) Seksi pengelolaan kas daerah
Membantu kepala bidang dalam mengusahakan, mengatur dana, menyimpan uang daerah dan memantau pelaksanaan penerimaan dana pengeluaran APBD.

8. Bidang Pengelolaan Aset

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian inventarisasi dan penghapusan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan koordinasi penilaian dan optimalisasi.
 - 1) Seksi inventaris aset
Membantu kepala bidang menyiapkan bahan perumusan, koordinasi inventarisasi.
 - 2) Seksi penilaian dan penghapusan
Menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penilaian dan penghapusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi pengendalian dan pengawasan

Melaksanakan pengadaan barang milik daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap barang milik daerah.

9. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibidang akuntansi dan pelaporan.

b. Menyiapkan bahan perumusan dalam pengelolaan data dan statistik

c. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan dinas

1) Seksi pembukuan dan akuntansi

Menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan daerah dalam arti mengidentifikasi, mencatat dan membukukan transaksi keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan melalui serangkaian prosedur akuntansi dan perangkat yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan daerah dalam suatu sistem akuntansi keuangan daerah.

2) Seksi bina pengelola keuangan daerah

Melakukan kajian mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, sakuntabel dan autitabel.